

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan demokratis (Zulkarnain, 2020). Saat ini, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut dan urusan konkuren, dengan berbagai tingkatan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki cakupan yang mencakup pemberian sumber penerimaan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Desentralisasi fiskal, yang dimulai pada tahun 2001, bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah guna memenuhi kepentingan Masyarakat (Yulinchton et al., 2022). Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan harus mengelola anggaran daerah untuk membiayai keperluan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, data menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Ini seharusnya tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah demi membiayai keperluan daerah secara mandiri (Jumati et al., 2023). Rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, sementara dana transfer dari APBN tetap menjadi sumber utama pendapatan APBD dengan persentasenya rata-rata mencapai 66,81% dari total pendapatan daerah dalam dua dekade terakhir (Hamidi et al., 2021)

Provinsi Lampung memiliki dua kota yaitu Bandar Lampung dan Metro, serta 13 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan. Semakin banyak daerah yang di pimpin oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tanggung jawab yang ditanggung oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. (Putu et al., 2014) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah.

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010). Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung dalam proses berjalannya suatu pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik berpengaruh besar terhadap kondisi suatu daerah dan dapat menjadikan daerah tersebut kuat dan berkuasa dari pada daerah lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Kinerja APBN hingga periode 31 Desember 2022 yang menunjukkan penerimaan di Lampung terealisasi sebesar 116,84 persen dari target penerimaan atau senilai Rp11,3 triliun. Adapun secara *year on year* (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 8,11 persen dengan kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp3,69 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,17 triliun. Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,55 persen dibandingkan November 2022. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut mencapai 115,79% dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan. Sedangkan untuk penerimaan PNBPN dari pengelolaan aset mencapai Rp14,38 Miliar atau naik 20,53% dari tahun lalu. Tren naiknya realisasi perpajakan di tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung juga terus tumbuh positif. (djpb.kemenkeu.go.id, 2023)

Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp29,84 triliun, naik sebesar 2,66 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yakni Rp27,19 triliun. Untuk kinerja APBD se-Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp27,23 triliun, Belanja Daerah Rp26,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,42 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp0,91 triliun. Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19,84 triliun atau 72,85% dari total pendapatan APBD (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2023). Kemudian pada tahun 2021, sebagaimana diungkapkan oleh Ardian, bahwa Lampung menduduki peringkat pertama dalam presentase realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA. 2021. Dalam kesempatan itu, Ardian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih presentase realisasi belanja tertinggi di Indonesia, yakni 47,52%. Sehingga dapat memperkecil gap atau jarak dengan realisasi pendapatannya yang sebesar 49,97%

(djpb.kemenkeu.go.id, 2023). Namun, pada 16 april 2023 dilansir dari CNBC Indonesia bahwa terdapat seorang WNI bernama Bima Yudho Saputro, seorang pelajar Indonesia di Australia, mengkritik kondisi infrastruktur dan Pembangunan di Lampung, terutama terkait dengan jalan-jalan yang rusak dan proyek-proyek Pembangunan yang terbengkalai. Hal tersebut, telah mengindikasikan bahwa berdasarkan berita yang dilansir oleh djpb.kemenkeu.go.id diatas tidak sejalan dengan berita bahwa Lampung menduduki peringkat pertama dalam presentase reliasasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA. 2021. Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat indikasi bahwa data kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Lampung tidak valid karena adanya perbedaan antara data yang tersedia dengan fakta yang terjadi dalam realita. Lebih lanjut, data mengenai kinerja pengelolaan APBD dan APBN Provinsi Lampung yang sebelumnya tersedia di website resmi djpb.kemenkeu.go.id telah dihapus sejak kasus viral yang melibatkan Bima. Pengelolaan belanja dalam suatu daerah yang baik seharusnya memberikan informasi secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, berdasarkan kejanggalan yang teridentifikasi, penelitian ini akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap kevalidan data tersebut.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anynda, 2020) dengan judul Pengaruh Rasio Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti objek Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan periode 2020-2022 sebagai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan judul yang akan diambil adalah:

**“Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan”
(Studi Empiris Pada Kab/Kota se-Provinsi Lampung)**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Ruang Lingkup Subjek

Penelitian ini akan berfokus pada subjek-subjek tertentu yang akan menjadi unit analisis. Subjek dalam penelitian ini adalah data dan informasi yang relevan yang diperoleh dari sumber-sumber terkait.

1.2.2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Penelitian ini akan membahas aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah Provinsi Lampung. Objek penelitian meliputi:

- a. Rasio kemandirian daerah, yang mencakup rasio ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan total daerah.
- b. Efektivitas pendapatan asli daerah, termasuk sumber-sumber pendapatan lokal yang digunakan dalam anggaran daerah.
- c. Pengelolaan belanja daerah, termasuk alokasi dan penggunaan dana untuk berbagai program, proyek, dan pelayanan publik.

1.2.3. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini akan difokuskan pada Provinsi Lampung, yang terletak di Indonesia. Seluruh analisis dan data yang digunakan dalam penelitian akan berhubungan dengan kondisi dan konteks Provinsi Lampung.

1.2.4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini akan mempertimbangkan data dan informasi yang mencakup periode 2020-2022 dalam sejarah keuangan daerah Provinsi Lampung. Waktu penelitian dapat mencakup beberapa tahun sebelum penelitian ini dilakukan, dengan fokus pada perkembangan kinerja keuangan daerah selama periode tersebut.

1.2.5. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan berfokus pada ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen keuangan daerah, ekonomi regional, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, penelitian akan menggabungkan aspek ekonomi, manajemen, dan kebijakan untuk memahami dampak rasio kemandirian

daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.4. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Bagi IIB Darmajaya

Sebagai peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi, khususnya akuntansi sektor publik mengenai rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Terkait

Dari hasil adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya dan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dan sebagai sarana untuk menambah wawasan berfikir serta meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini membahas mengenai konsep kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, kinerja keuangan daerah, hubungan antara faktor-faktor penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, metode analisis data, pengujian hipotesis

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data rasio kemandirian daerah, analisis data efektivitas pendapatan asli daerah, analisis data pengelolaan belanja daerah, pengujian model, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, rekomendasi kebijakan, dan saran untuk penelitian selanjutnya